



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU PELALAWAN DALAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau



**OLEH :**

**AKHMAD MUSENO**  
**NIM : 11527104016**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2019**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Hj, NURAINI SAHU,SH,MH

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 29 July 2019

No :

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr. AKHMAD MUSENO

*Asslamu'alaikum. Wr.Wb*


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara AKHMAD MUSENO, yang berjudul "**Peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau**" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqosah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamua'alaikum Wr.Wb*

Pembimbing

  
**Hj. NURAINI SAHU, SH, MH**  
 NIP. 19590711 199503 2 001

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul "PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU PELALAWAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU", yang ditulis oleh :

Nama : AKHMAD MUSENO  
NIM : 11527104016  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 September 2019 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Magfiroh, MA**

Sekretaris  
**Dra. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Arisman, M.Sy**

Penguji II  
**Lovelly Dwina Dahren SH, MH**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul "PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU PELALAWAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU", yang ditulis oleh :

Nama : AKHMAD MUSENO  
NIM : 11527104016  
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa, 27 Agustus 2019  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 September 2019 M  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua  
Dr. H. Magfiroh, MA

Sekretaris  
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I  
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II  
Lovelly Dwina Dahen SH, MH

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Erni, S.Sos., MM  
NIP. 19680226 199103 2 002

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD MUSENO  
 NIM : 11527104016  
 Tempat / Tanggal Lahir : Pelalawan, 18 Mei 1997  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim  
 RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau”, adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



**AKHMAD MUSENO**  
 NIM: 11527104016

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Akhmad Museno, (2019): Peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau**

Peran dari Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan Peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, sangat perlu diperhatikan karena di daerah Riau khususnya Kabupaten Pelalawan memiliki suatu Lembaga Adat Melayu Riau, yang ada di kabupatennya dan memiliki posisi khusus di dalam sitem pemerintahan di Kabupaten Pelalawan, salah satu bukti tersebut ialah dengan adanya aturan yang mengatur bahwa Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan memiliki hak dan ikut andil didalam membuat dan membahas peraturan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Darah Kabupaten Pelalawan, namun di dalam realitanya posisi tersebut masih kurang jelas dan tidak optimalnya ketentuan di dalam aturan yang mengatur.

Masalah pokok dalam penelitian ini ialah Peran dari Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan Peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, serta faktor yang menghambat peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan Peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu tergolong kedalam jenis penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi penelitian, sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Adapun penulis melakukan penelitian ini pada Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, kemudian populasi dalam penelitian ini ialah 32 orang yaitu, 20 orang pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan, , 10 pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau, 1 orang Keatua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, dan 1 orang ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan , dengan populasinya penulis ambil sebanyak 22 orang sebagai sampel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dari Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan Peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau, belum berjalan secara optimal sesuai dengan harapan dan juga peraturan yang mengatur, adapun faktor yang menghambat peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan Peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau yaitu kurang optimalnya sumber finansial, kurang optimalnya tenaga dan sumberdaya manusia, kurang optimalnya sumber yang menunjang fasilitas kerja, dan kurang optimalnya kerja sama dalam menjalankan tugasnya.

**Kata Kunci: Peran, Lembaga Adat Melayu Pelalawan, Pembentukan Peraturan Daerah**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan Karunianya kepada Penulis, hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul 'PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU PELALAWAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU' dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat dan salam tetapa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw yang telah berjasa dan berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhoi oleh Allah swt.

Penulisan skripsi ini ialah bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan Kritik dan saran yang menmbangun untuk melengkapi skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Alm.Karsono dan Bu Sriyah, yang merupakan orang tua dari penulis yang telah berjasa mendidik membesarkan penulis dari kandungan sampai besar saat ini. serta Kakek, Nenek, Paman dan Tante penulis serta yang terkhususkan untuk saudara-saudara penulis yaitu, Erick Sudrajat, Sutyem

yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk cepat menyelesaikan program Sarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin , M.Ag selaku Rektor, Bapak Dr. Drs. H. Suryan A.Jamrah, MA selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Ahmad Supardi MA selaku Wakil Rektor II, Drs H. Promadi, MA., Ph.D. selaku Wakil rektor III dari Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. Heri Sunandar,M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Wahidin, M.Ag selaku wakil Dekan II, Bapak Dr, H.Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau,yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan .
4. Bapak Firdaus, S.H, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim,S.Ag,S.H,M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Ibu Musrifah, S.H, MH selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
6. Ibu Hj. Nuraini Sahu S.H, MH selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, nasehat,masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan banyak bimbingan serta Ilmu Pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Bapak Nasarudin SH,MH sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengambilan data dan informasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut Ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau
10. Dan kepada seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah swt membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya bagi pihak yang memerlukan dan menambah pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

***Wassalam.***

Pekanbaru, 10 September 2019  
Penulis

**AKHMAD MUSENO**  
**11527104016**

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PENGESAHAN

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	16

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan .....	18
1. Sejarah Kabupaten Pelalawan .....	18
2. Keadaan Geografis .....	21
3. Kependudukan .....	26
B. Gambaran Umum Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan .....	29
1. Sejarah Lembaga Adat Melayu Pelalawan.....	29
2. Visi dan Misi .....	30
3. Tugas dan Fungsi .....	31
4. Struktur Organisasi.....	33

### BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Umum Peran .....	34
B. Tinjauan Umum Lembaga .....	34
C. Tinjauan Umum Pemerintahan Daerah .....	44
D. Tinjauan Umum Hukum Adat.....	48

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Keterlibatan Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau .....	55
B. Faktor penghambat dan pendukung dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan .....	63

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

#### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel I.1	Populasi dan Sampel .....	14
-----------	---------------------------	----





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*). Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan kesatuan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.<sup>2</sup>

Bangsa Indonesia dikenal dengan keragaman masyarakat dan budayanya, yang dibuktikan dengan adanya berbagai suku bangsa, ras, bahasa, seni, adat istiadat, sistem kepercayaan (religi) dan juga sistem nilai budayanya. Keragaman budaya yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia tersebut pada dasarnya tidak luput dari dinamika atau mengalami perkembangan dan perubahan menyangkut unsur-unsur budaya yang dimilikinya. Namun demikian, pada setiap masyarakat diantara unsur-unsur budaya tersebut biasanya masih ada yang relatif tidak berubah karena merupakan inti dari

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, , 1986) h.538

<sup>2</sup> *Ibid*, h.539

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebudayaan tersebut. Dalam hal ini, biasanya adalah sistem nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut secara turun-temurun. Sistem nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dinilai berharga dan penting oleh suatu masyarakat, sehingga dapat berfungsi sebagai pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tadi.<sup>3</sup>

Melihat idiologisasi hukum adat di Indonesia, Soepomo dalam pidatonya pernah mengungkapkan, bahwa hukum adat Indonesia adalah bercorak komunal sehingga memungkinkan tidak terjadinya konflik dan perselisihan antar sesama golongan.<sup>4</sup> Maksud dari pernyataan ini adalah tidak ada rasa pertentangan antara individu dengan golongannya karena dalam suasana batinnya golongan tersebut identik dengan individu yang bersangkutan. Soepomo juga menegaskan walaupun secara lahiriah hukum adat dari golongan-golongan atau suku-suku di Indonesia adalah sama dan walaupun terjadi perbedaan hal tersebut merupakan sesuatu yang bersifat gradualis dan tidak bersifat prinsip.<sup>5</sup>

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dalam hukum adat tidak mengutamakan kepentingan secara individual, prinsip inilah yang menjadi corak perbedaan dengan hukum barat, sebagaimana hukum barat mengenal penyelenggaraan hukum yang bersifat individu, sementara dalam hukum adat, mengenal individu sebagai subyek yang bertujuan untuk mengabdikan kepada

<sup>3</sup>Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), h.204.

<sup>4</sup>H.R. Otje Salman Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cet.I, Bandung : PT Alumni, 2002) h.122

<sup>5</sup>*Ibid*, h.122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan masyarakat. Jadi di sini hukum adat memiliki tujuan primer tercapainya keselarasan individu dengan masyarakat. Berbeda dengan hukum barat yang tujuan primernya adalah menjaga kepentingan individu.

Tiap-tiap hukum merupakan sebuah sistem yaitu “peraturanya merupakan suatu kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran”. Sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional, adalah sebagai salah satu bagian dari hukum positif yang secara konstitusional “diakui” oleh negara. Istilah diakui (pengakuan) mengandung makna atau pengertian yang berbeda dengan istilah ditetapkan (penetapan).<sup>6</sup>

Keberadaan masyarakat hukum atau persekutuan hukum tidaklah dapat digugat oleh siapa pun, karena terbentuknya merupakan suatu *natuurnoodwendigheid*. Menurut Ter Haar suatu realitas *metejurisch* yang tidak seorangpun berfikir untuk membubarkannya. Ter Haar menulis *Goerdende groepen van blivend karakter met eigen bewind en eigen materieel en in materieel vergoegen* (Kelompok-kelompok yang akan tetap berkarakter dengan aturan mereka sendiri dan bahan mereka sendiri dan berbobot tak terukur). Unsur-unsur definisi ini merupakan kriteria eksistensial masyarakat hukum atau persekutuan hukum menurut sistem hukum adat, yaitu: (a).

<sup>6</sup> Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) h.174



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tatanan kelompok yang bersifat tetap, (b). dengan kekuasaan (penguasa) sendiri, dan (c). kekayaan materiel dan bukan materiel sendiri.<sup>7</sup>

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang mencerminkan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis karena mengikutsertakan rakyatnya dalam suatu pengambilan kebijakan. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai suatu kewajiban untuk melaksanakan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan atas hukum yang selaras dengan system hukum nasional Indonesia. Sistem hukum nasional Indonesia merupakan suatu gabungan dari beberapa elemen-elemen hukum yang saling berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dari lingkup terkecil yaitu desa sampai lingkup terbesar adalah negara, sehingga peraturan yang mengatur itu pun berbeda-beda dari setiap lingkungannya.

Selanjutnya didalam pasal 18 B Ayat 2 menyatakan “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dari hal inilah lahir lembaga yang secara khusus menangani masalah adat ini.

Lembaga adat, merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat adat itu sendiri, oleh karena itu kedudukan lembaga adat sangat

<sup>7</sup>Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Penada media Group, 2014) h.91



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategis untuk menampung aspirasi anggota masyarakat adat maupun dalam proses penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat adat maupun antara anggota masyarakat adat, maupun antara warga masyarakat adat dengan pemerintah dengan arif dan bijaksana dengan berpedoman pada norma adat bersendikan syarah dan kitabullah, serta aturan adat yang mengatur segala sendi kehidupan bermasyarakat baik dalam pengelolaan pemerintahan sebagai mana pepatah adat :

“Alam Nan Berajo Rantau Nan Berjenang, Negeri anan babathinan, Luhak Nan Berpenghulu, Kampung Nan Bertua, rumah Nan Bertenganai”.<sup>8</sup>

Maksud dari pepatah adat ini yaitu: bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup ditengah-tengah masyarakat memegang peranan penting dalam pergaulan dan dapat atau mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Selain itu, adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup bersendikan syara', syara; bersendi Kitabullah perlu dibina dan dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdayaguna untuk kelancaran pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional.

Lembaga adat, dilihat dari padanan katanya, berasal dari gabungan antara kata “lembaga” dan kata “adat”. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut dengan *instution* yang berarti pendiria, lembaga, adat dan kebiasaan. Sedangkan adat merujuk pada kebiasaan pada kebiasaan pada suatu masyarakat yang telah berlangsung secara turun temurun. Dengan demikian

<sup>8</sup> Sepian dkk, *Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi*, Jurnal Arif: Vol . 1, No. 2, Desember 2017, 192-193

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga adat mengandung pengertian adanya lembaga atau organisasi kemasyarakatan (sosial) yang berkaitan dengan adat yang berlaku disuatu daerah atau kesatuan masyarakat adat. Pengertian lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut.<sup>9</sup>

Keberadaan lembaga adat pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan suatu masyarakat, dan fungsinya adalah untuk menjaga, melaksanakan dan melestarikan adat yang berlaku pada masyarakat turun temurun. Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya adalah mensosialisasi norma dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/pemufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada diluar susunan organisasi pemerintahan. Adapun tugas lembaga adat, dapat dirujuk kepada PERMRNDAGRI No.3 Tahun 1997 sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

<sup>9</sup>Ayu Mukhtaoumi dkk. *Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No. 2, h.33

<sup>10</sup> Husni Thamrin, *Fenomena Budaya, Sosial-Agama Dan Pendidikan*, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2007), h. 33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Untuk menjalankan tugas-tugas, hak-hak, wewenang dan kewajiban sebagai dimaksud diatas, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan pendukung keberhasilan pembinaan masyarakat. Identitas adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat harus jelas.<sup>11</sup>

Selain itu Komonitas adat merupakan salah satu komponen dalam struktur kemasyarakatan bangsa Indonesia yang belum secara optimal mampu menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Jumlah mereka masih cukup besar tersebar di lokasi yang relative sulit dijangkau, dan pada umumnya jauh tertinggal secara ekonomis maupun sosial budaya dibandingkan warga negara lainnya. Mereka itu adalah sebagaian warga negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan warga negara

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h.34



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Komunitas adat menjalani kehidupan dalam kekhasan secara sosial budaya, sehingga mudah dibedakan dengan masyarakat yang relatif lebih maju. Karakteristik komunitas ada secara umum adalah berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen, pranata sosial bertumpu pada kekerabatan, terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau, hidup dengan sistem ekonomi subsistem, menggunakan peralatan dan teknologi sederhana, ketergantungan pada lingkungan alam setempat relatif tinggi, dan terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.<sup>12</sup>

Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan ini memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No.1 Tahun 2012 pada Bab VII pasal 9, yaitu:<sup>13</sup>

1. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya Melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum syara' dan hukum negara.
2. Menanam dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjiwa ke Melayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

<sup>12</sup> Konsideran Menimbang Poin A dan B Keppres Nomor 111 Tahun 1999

<sup>13</sup> Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainya dan pemerintah.
4. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
5. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusi masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku

Dari penjelasan Peraturan Daerah tersebut maka Pemerintahan di Kabupten Pelalawan baik itu dari segi pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta dalam menghadapi konflik, gejolak dan permasalahan pemerintahan di daerah, kepala daerah Kabupaten Pelalawan secara terus-menerus dihadapkan oleh berbagai tuntutan dan tantangan, baik secara internal maupun eksternal, yang harus direspon dan diantisipasi sekaligus merupakan ujian terhadap kapabilitas dan kompetensi kepala daerah Kabupaten Pelalawan. Landasan normatif penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terus berubah dalam beberapa kurun waktu tertentu, akibat pengaruh perubahan politik pemerintahan, telah memberi warna tersendiri dalam pola kegiatan, pola kekuasaan, dan pola perilaku kepemimpinan kepala daerah di Kabupaten Pelalawan. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, sebagai ketentuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif yang mengatur sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan kepala daerah.

Atas dasar tugas dan wewenang kepala daerah maka terbentuklah Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau. Kabupaten Pelalawan masih menggunakan produk peraturan daerah provinsi dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang lembaga adat.

Pada umumnya rancangan peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan tidak memakan waktu yang lama. Menurut dari berbagai sumber yang di dapat oleh penulis, rentan waktu yang diperlukan untuk disahkannya Perda tidak terlalu lama, namun di karenakan proses di DPRD dan kurangnya peran lembaga adat di Kabupetan Pelalawan dalam memberikan pendapat terhadap kepala daerah serta memperjuangkan hak-hak konstitusional masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan.

Namun saat ini yang menjadi permasalahan yang sangat serius ialah tidak adanya peraturan secara khusus yang mengatur tentang kedudukan Lembaga Adat Melayu Pelalawan, yang mana ini bermuara sebagai payung Hukum untuk Lembaga Adat Melayu Pelalawan. Dari hal ini maka Lembaga Adat Melayu Pelalawan Perlu mengusahakan supaya ada aturan untuk patung hukum mereka berdiri di Kabupaten Pelalawan. . Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai **“Peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat melayu Riau”**.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang topik persoalan, maka penulis akan membatasi permasalahan ini yakni berfokus kepada Peran dari Lembaga Adat Kabupaten Pelalawan dalam pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keterlibatan Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
  - a. Mengetahui peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan
2. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:
  - a. Sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana hukum
  - b. Untuk menambah wawasan dalam peran lembaga adat

#### Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis, dimana penulis secara langsung turun lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum sosiologis, dimana penulis secara langsung turun lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.<sup>14</sup>

Kemudian sifat dari penelitian ini ialah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitikberatkan pada penelitian lapangan secara menyeluruh, sistematis, dan akurat.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012) h.14

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan khususnya di Lembaga Adat Melayu Riau daerah kabupaten Pelalawan, yang terletak di Jl. Datuk Laksemana Mangku Diraja Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Pelalawan Pangkalan Kerinci Riau 29381. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan ialah karena pada sampai saat ini perda tentang lembaga adat di Kabupaten Pelalawan belum ada dan kurangnya peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan Perda di Kabupaten Pelalawan.

#### 3. Populasi dan Sampel.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang-orang benda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama<sup>15</sup>, Sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini ialah *Total Quota Sampling*, yaitu mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti dalam penelitian ini.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003) h.121

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

No		Populasi	Sampel	Ket
1	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan	1	1	100%
2	Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan	1	1	100 %
3	Pengurus Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau	10	10	100%
4	Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan	20	10	50%
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>22</b>	<b>87 %</b>

#### 4. Data dan Sumber Data.

Adapun data dalam penelitian ini adalah data yang terdiri dari:

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data atau keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis memperoleh data Primer dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara berkaitan dengan peran Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan dalam pembuatan perda

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Adapun data sekunder dalam penelitian ini penulis ambil dari buku-

<sup>16</sup>Zainudin Ali, *Metodel Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 175

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 179



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku tentang hukum, jurnal hukum dan peraturan-peraturan Peran Lembaga adat.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>18</sup>

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana peran Lembaga Adat Melayu di Kabupaten Pelalawan, yakni selama 3 bulan, mulai dari bulan April sampai bulan Juni.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden dilapangan, yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selain itu Wawancara, juga merupakan situasi peran antara pribadi bertatap muka ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.<sup>19</sup>
- c. Studi Pustaka, yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan lembaga Adat, dan eksistensi payung hukum dalam hirierki peraturan perundang-undangan di negara Indonesia.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. cit*, h.13

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 82

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian ini yakni berupa Surat Keterangan (SK) berdirinya Lembaga Adat Melayu Pelalawan,

#### 6. Metode Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, analisis kualitatif ialah dari suatu upaya pengumpulan data, mengorganisasikan data memilah data, mengelolanya sehingga mendapatkan kesimpulan dari data tersebut, apabila data tersebut tidak berupa angka, dan metode pengumpulan data tersebut menggunakan wawancara dan pengamatan.<sup>20</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan pembahasan didalam skripsi ini ialah disusun berdasarkan sistematika yang terdiri dari lima Bab, yaitu :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

##### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang Sejarah Singkat Lembaga Adat Melayu Kabupaten Pelalawan, Letak Geografis Lembaga Adat Melayu

<sup>20</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), t. ke-4, h. 77

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Pelalawan, serta Struktur Organisasi Lembaga Adat Melayu Kabupaten Pelalawan.

**BAB III : TINJAUAN TEORI**

Bab ini berisi tentang peran, kelembagaan, peraturan daerah, dan adat.

**BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang kajian hasil penelitian data dan pembahasan yang diperoleh dari lapangan selama penelitian berlangsung meliputi peran Lembaga Adat dalam pembuatan Perda, dan faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya peran Lembaga Adat dalam meningkatkan perannya dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat melayu Riau.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

##### 1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan UU. No. 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan.<sup>21</sup>

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan Kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui musyawarah besar masyarakat Kampar Hilir pada tanggal 11 s/d 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan yang bermula dari Kerajaan Pekantua, yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699 M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa

<sup>21</sup> [http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic\\_content.main&id\\_gc=63](http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=63)  
akses tanggal 17 Januari 2019, (jam 15.00)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pulau Besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul ( Penyalai ), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan Pulau-pulau kecil lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sampai akhir 2010 adalah sebanyak 311.726 jiwa atau 80.964 KK yang terdiri dari berbagai macam etnis budaya. Di Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran Sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45 %) dan kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan adalah Ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibukota kabupaten yaitu 1 Km sedangkan jarak terjauh dari ibukota Kabupaten adalah ibukota Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam.<sup>22</sup>

Dilihat dari posisinya Kabupaten Pelalawan terletak pada titik koordinat 0046,24 LU. Sampai dengan 0024,34 Lintang Selatan dan 10130,37 BT, sampai dengan 10321,36 BT, merupakan kawasan strategis yang dilewati jalur Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur ekonomi terpadat. Disamping itu Kabupaten Pelalawan juga

---

<sup>22</sup> Ibid

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbatasan langsung dengan wilayah Propinsi Kepulauan Riau tepatnya Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.528/XI/2000 tanggal 9 November tahun 2000 tentang diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten Pelalawan hasil Pemilu Tahun 1999 sebanyak 25 orang. Pengambilan sumpah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang atas nama Ketua MA RI tanggal 15 November tahun 2000.

Dengan terbentuknya Legislatif ( DPRD ) Kabupaten Pelalawan, maka pemilihan Bupati Pertama dilakukan pada tanggal 5 Maret 2001 melalui Sidang Paripurna, terpilihlah pasangan T.Azmun Jaafar, SH dengan ABD.Anas Badrun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Periode 2001 s/d 2006. Pada tanggal 5 April 2004 diadakan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan secara langsung dipilih oleh rakyat, dari hasil pemilihan tersebut terbentuk DPRD Kabupaten Pelalawan dengan Surat Keputusan No.KPTS.508/VIII/2004 tentang Anggota Dewan Kabupaten Pelalawan Masa Jabatan 2004 – 2009 yang diresmikan pengangkatannya.<sup>23</sup>

Setahun setelah Pemilihan Anggota DPRD tepatnya tanggal 8 Februari 2006 diadakan pemilihan Bupati / Wakil Bupati secara langsung dipilih oleh rakyat, hasil pemilihan tersebut memenangkan pasangan T.Azmun Jaafar dengan Rustam Effendi yang kemudian di kukuhkan

---

<sup>23</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131-14-94 Tahun 2006 tentang pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Bupati Pelalawan Propinsi Riau.

Kabupaten Pelalawan terletak di pesisir Timur Pulau Sumatera, dengan wilayah daratan yang membentang di sepanjang bagian Hilir Sungai Kampar serta berdekatan dengan Selat Malaka. Secara geografis Kabupaten Pelalawan terletak antara 1°25" LU dan 0°,20" LS serta antara 100°,42" ~ 103°,28" BT dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Riau

Pemilukada tahap kedua di Kabupaten Pelalawan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2011. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Tanggal 20 Februari 2011 ditetapkan pasangan HM Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan periode 2011-2016.

## 2. Keadaan Geografis

Luas kabupaten Pelalawan adalah 1.392.494 Ha atau 14,73 % dari luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha ).Secara geografis,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelalawan berada di 00° 46,24' LU sampai 00°24,34 LS dan 101° 30,37' BT sampai dengan 103° 21,36'<sup>24</sup>.

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari Sungai, dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu.

#### a. Batas Administratif

Batas administratif Kabupaten Pelalawan, yaitu sebelah Utara dengan Kabupaten Siak Sebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepri dan Kabupaten Bengkalis.

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan:

- 1) Langgam, luas 144.245,09 Ha
- 2) Bunut, luas 40.802,77 Ha
- 3) Pangkalan Kuras, luas 118.388,79 Ha
- 4) Kuala kampar, luas 150.265,19 Ha
- 5) Pangkalan Kerinci, luas 19.355,53 Ha
- 6) Ukui, luas 129.956,06 H
- 7) Pelalawan, luas 149.811,31 Ha

<sup>24</sup>[http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic\\_content.main&id\\_gc=64](http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=64)

akses tanggal 17 Januari 2019, (jam 15.00)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Pangkalan Lesung, luas 50.485,12 Ha
- 9) Kerumutan, luas 96.003,66 Ha
- 10) Teluk Meranti, luas 423.984,41 Ha
- 11) Kecamatan Bandar Petalangan, Luas 37.255,16 Ha
- 12) Kecamatan Bandar Sekijang, Luas 31.941,2 Ha

Sebagian besar dataran wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3-6 meter dengan kemiringan lahan rata-rata  $\pm 0-15\%$  dan  $15-40\%$ .

Daerah/kota yang tinggi adalah Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras dengan ketinggian  $\pm 6$  meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam Kecamatan Kuala Kampar dengan ketinggian  $\pm 3,5$  meter.

Di wilayah Kabupaten Pelalawan dialiri sebuah Sungai Kampar dengan ratusan anak sungai. Panjang Sungai Kampar  $\pm 413,5$  km, dengan kedalaman rata-rata  $\pm 7,7$  meter, lebar rata-rata 143 meter. Sungai ini dan anak-anak sungainya berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budidaya perikanan dan irigasi.

Wilayah dataran rendah kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah dataran banjirnya. Dataran ini dibentuk oleh endapan aluvium muda dan aluvium tua terdiri dari endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut.

Curah hujan disuatu tempat antara lain dipengaruhi oleh iklim, keadaan ortografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan pada tahun 2010 berkisar antara 127,8 mm sampai 318,3 mm. Suhu dan kelembaban udara disuatu tempat antara lain ditentukan oleh rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Pada tahun 2010 suhu udara rata-rata pada siang hari berkisar antara 33,0-35,4 derajat celcius, sedangkan pada

Malam hari berkisar antara 20,5-23,2 derajat celcius. Suhu udara maximum 35,4 derajat celcius terjadi pada bulan Mei 2010, sedangkan suhu udara minimum terendah 20,5 derajat celcius terjadi pada bulan Juli 2010. Sedangkan rata-rata kelembaban udara selama tahun 2010 berkisar antara 78-83 persen.

b. Penduduk

Penduduk di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2011 adalah sebanyak 321.947 jiwa yang terdiri dari 169.282 jiwa penduduk laki-laki dan 152.665 jiwa penduduk perempuan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan jumlah penduduk 73.078 jiwa dan Kecamatan yang paling rendah kepadatan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduknya adalah Kecamatan Bunut dengan jumlah penduduk 12.125 jiwa.<sup>25</sup>

c. Tenaga Kerja

Masalah Kependudukan selalu berkaitan dengan ketenagakerjaan. Salah satu contoh adalah tingginya tingkat pertumbuhan penduduk akan berpengaruh juga pada tingginya penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja yang tinggi tanpa diikuti penyediaan kesempatan kerja yang cukup dan memadai akan peningkatan pengangguran. Pada tahun 2010 pencari kerja yang mendaftar di Disnaker Kabupaten Pelalawan berjumlah 3.708 orang. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pencari kerja yang terdaftar adalah tamatan SMU atau sederajat 1.382 orang.

Masalah tenaga kerja tidak terlepas dari upah Minimum Kabupaten Pelalawan (UMK) yang merupakan salah satu pertimbangan penting bagi investor yang ingin menanamkan modalnya disuatu daerah terutama investor yang mau mendirikan pabrik atau industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Semakin tinggi Upah Minimum Kabupaten (UMK) suatu daerah memberikan gambaran semakin tinggi tingkat ekonominya.

d. Upah Minimum Kabupaten (UMK)

Secara umum kondisi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan seiring dengan semakin

---

<sup>25</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingginya harga berbagai macam kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 10 Tahun 2011 tanggal 01 Februari 2011 tentang Upah Minimum sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Pertanian Tanaman Karet Propinsi Riau Tahun 2011 sebesar Rp.1.234.000,- Sedangkan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 49 Tahun 2010 Tanggal 30 November 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 sebesar Rp. 1.128.000,-

Penduduknya Kabupaten Pelalawan merupakan Penduduk yang heterogen yang terdiri dari berbagai jenis suku dan bahasa. Namun walaupun merupakan masyarakat yang heterogen penduduk yang ada di Kabupaten Pelalawan baik penduduk asli maupun para pendatang hidup dalam lingkungan yang harmonis. Suku yang utama yang terdapat di Kabupaten Pelalawan adalah suku Melayu, sedangkan suku pendatang yang ada di Kabupaten Pelalawan ini cukup banyak yaitu suku Minang, suku Batak, suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, Banjar dan Bugis. Di kabupaten Pelalawan ini juga terdapat suku asli pedalaman yaitu suku Mamak, suku Laut dan Suku sakai.

### 3. Kependudukan

#### a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2019 berjumlah 321.947 orang, terdiri dari 169.282 orang laki-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki (52,58 persen) dan 152.665 orang perempuan (47,42 persen). Dibandingkan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun 2002, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sebanyak 179.199 orang yang terdiri dari 52,60 persen (94.265 orang) laki-laki dan 47,40 persen (84.934 orang) perempuan.<sup>26</sup>

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2002 dan pertengahan tahun 2019 berturut-turut adalah 179.199 dan 321.947 jiwa. Sehingga laju pertumbuhan penduduk per tahun dalam kurun waktu 2002—2011 adalah 6,73 persen. Angka tersebut mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan meningkat hampir dua kali lipat selama periode sepuluh tahun.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1, lonjakan jumlah penduduk mulai terjadi setelah pemekaran Kabupaten Pelalawan yang terpisah dari induknya Kabupaten Kampar. Sehingga jika dilihat dari pertumbuhan penduduknya saja, Kabupaten Pelalawan terus berkembang sebagai kabupaten baru.

#### b. Sebaran Penduduk

Salah satu ciri demografi Indonesia adalah sebaran penduduk yang tidak merata, hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Pelalawan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Pelalawan

<sup>26</sup> [http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic\\_content.main&id\\_gc=66](http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=66)  
akses tanggal 17 Januari 2019, (jam 15.00)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdomisili di ibukota kabupaten, sisanya menyebar di kecamatan-kecamatan lainnya. Sebanyak 76.884 jiwa penduduk tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci, setara dengan 23,88 persen dari seluruh penduduk di Kabupaten Pelalawan. Sementara kecamatan yang paling sedikit dihuni penduduk adalah kecamatan Bunut, sebanyak 3,90 persen sejumlah 12.505 jiwa.

#### c. Rata-rata Anggota Rumah Tangga

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2019 sebanyak 83.648 rumah tangga. Rumah tangga terbanyak di Kecamatan Pangkalan Kerinci sebanyak 20.682 rumah tangga kemudian Pangkalan Kuras sebanyak 12.427 rumah tangga. Sementara rumah tangga paling sedikit di Kecamatan Bunut sebanyak 3.311 rumah tangga.

Rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten Pelalawan sebesar empat jiwa per rumah tangga. Dilihat menurut kecamatan, semua kecamatan di Kabupaten Pelalawan mempunyai rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar empat orang di setiap kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

#### d. Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Pelalawan pada pertengahan tahun 2019 sebesar 111. Hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada perempuan. Kondisi rasio



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis kelamin lima tahun yang lalu, tahun 2002 juga mempunyai besaran yang sama yaitu 111.

Kecamatan Ukui memiliki rasio jenis kelamin terbesar bila dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Pelalawan, yaitu sebesar 116. Sedang kecamatan yang memiliki rasio jenis kelamin terkecil adalah Kecamatan Bandar Petalangan, yaitu sebesar 106 yang mencerminkan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang di Kecamatan Bandar Petalangan.

e. **Kepadatan Penduduk**

Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan 13.924,94 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk pertengahan tahun 2019 adalah 14 jiwa per km<sup>2</sup> kemudian pada pertengahan tahun 2011 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 23 jiwa per km<sup>2</sup>.

**B. Gambaran Umum Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan**

**1. Sejarah Lemabaga Adat Melayu Riau Pelalawan**

Untuk dapat menggali, membina dan mengembangkan adat istiadat ini tentulah diperlukan wadah yang tepat, yang didalamnya duduk para tokoh adat, budayawan dan sejarawan, sehingga diharapkan mampu melaksanakan misioninya secara baik dan bersungguh-sungguh. Wadah itu antara lain adalah: kelembagaan adat, baik kelembagaan adat Melayu Pesisir maupun kelembagaan adat Melayu Darat (Petalangan). Kemudian digabungkan menjadi kelembagaan adat Kabupaten Pelalawan. Sampai saat ini yang sudah terbentuk adalah kelembagaan adat Petalangan, yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamakan “ lembaga adat Petalangan”. Makanya, perlu pula dibentuk kelembagaan adat Melayu Pesisir, yang dinamakan “lembaga adat Pesisir”. Untuk mewujudkan kebersamaan, meningkatkan jalinan kekerabatan dan kerjasama yang serasi, terutama dalam menghadapi hari depan daerah ini yang penuh dengan cobaan dan tantangan, sebaiknya dibentuk pula gabungan kedua lembaga adat tadi, yang dinamakan: “Lembaga Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan”, atau “Majelis Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan”.<sup>27</sup> Berdirinya dan digabungnya kedua lembaga tersebut pada tahun 1999.<sup>28</sup>

Setelah terbitnya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau susunan organisasi dan nama lembaga berubah lagi dikarenakan setiap lembaga adat melayu di Riau harus mengikuti Perda tersebut, maka dengan terbitnya Perda tersebut Lembaga Kerapatan Adat Melayu Kabupaten Pelalawan berubah menjadi Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan mulai tahun 2018.<sup>29</sup>

## 2. Visi dan Misi

Visi yang dicanangkan oleh LAM Riau Pelalawan yaitu terwujudnya masyarakat adat berbudaya Melayu yang maju, adil, dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi LAM Riau:

- a. Memperkuat/memperkokoh jati diri masyarakat Melayu.

<sup>27</sup> Tenas Effendy dkk, *Hutan Tanah Wilayah dan Permasalahan di Kabupaten Pelalawan*, (Pelalawan: PT Subenta Perkasa, 2005), h.54.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurzepri, sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan tanggal 6 Mei 2019 (jam 10.30).

<sup>29</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melindungi, memelihara, dan membina hak-hak masyarakat adat Melayu Riau untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriah dan batiniah.

Adapun Misi LAM Riau Pelalawan yaitu memperkuat/memperkokoh jati diri masyarakat Melayu. Kegiatan ini ditumpukan pada pelestarian (penggalan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan):

- a. Nilai-nilai dan norma dalam adat budaya Melayu.
- b. Istiadat/resam/tradisi, yaitu kebiasaan berpola warisan masa lampai masyarakat Melayu Riau.
- c. Karya/artefak, yaitu ekspresi dan benda-benda peninggalan masa lampau.<sup>30</sup>

Dalam ‘bahasa pemerintah’, ketiganya disebut Warisan Budaya Tak Benda (*intangible heritage*) dan Warisan Budaya Bendawi (*tangible heritage*)

### 3. Tugas dan Fungsi

Tugas yang di emban oleh LAM Riau Pelalawan adalah:

- a. Menggali membina, mengembangkan dan mewariskan adat dan budaya melayu yang tidak bertentangan dengan agama islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan pembangunan bangsa.
- b. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat istiadat dan budata melayu yang terdapat

---

<sup>30</sup> Ibid



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum syarak dan hukum Negara.

- c. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat melayu terhadap adat istiadat dan budaya melayu Riau. Dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri kemelayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Mengadakan dan mengupayakan kerja sama yang serasi dan bermanfaat dengan semua kalangan masyarakat lainnyadan pemerintah.
- e. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah dalam meningkatkan peran masyarakat adat untuk menggerakan proses pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta melestarikan nilai-nilai agama islam dan adat istiadat.
- f. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak masyarakat adat melayu Riau sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan, dan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku.
- g. Melakukan usaha dalam kegiatan penyebarluasan kebudayaan pengembangan adat istiadat dan budaya melayu Riau yang telah ditetapkan baik oleh Lembaga Adat maupun bersama-sama dengan pihak pemerintah (umara) dan masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

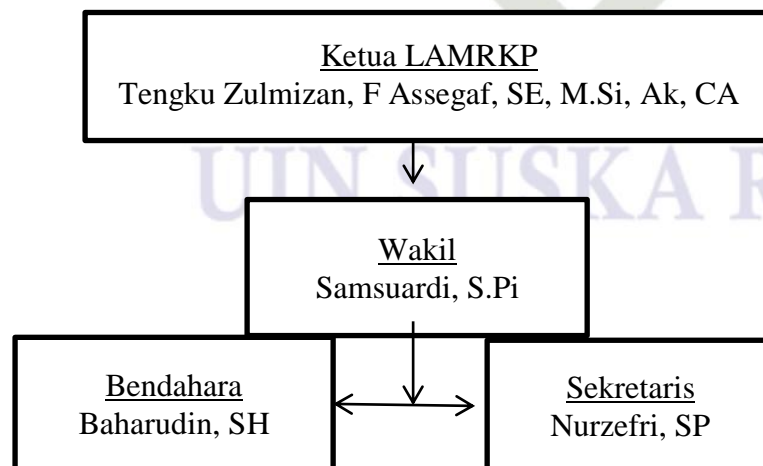
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi dari LAM Riau Pelalawan yaitu:

- Sebagai wadah berhimpunya anggota masyarakat adat yang menjadi penyokong utama adat istiadat dan budaya melayu Riau.
- Mengekalkan nilai-nilai adat sebenar adat, adat yang diadatkan dan adat yang teradat.
- Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat dan agama islam, serta membela kepentingan masyarakat adat melayu Riau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Memantau, menampung, memadukan, menyalurkan dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat adat melayu Riau.
- Sebagai mitra pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat melayu Riau melalui proses pembangunan yang bersifat partisipatif.
- Sebagai penapis masuknya nilai-nilai negatif budaya luar dan menyerap nilai-nilai positifnya untuk kemaslahatan bersama.

#### 4 Struktur Organisasi Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan (2018-2023)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Peran

Penegertian peranan menurut kamus bahas Indonesia yaitu sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan itu sendiri yaitu bagian dari tugas utama yang harus dilakukan masyarakat.<sup>31</sup>

Pengertian peranan menurut Mason Gross yaitu sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.<sup>32</sup> Harapan tersebut merupakan imbalan dari norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan peranan ditentukan oleh norma dalam masyarakat.

Istilah “peranan” (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku di dalam masyarakat dimana dia hidup. Tambahan pula, dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan, seperti aktor-aktor profesional tertentu yang muncul dalam satu peranan pada pertunjukan pagi dalam pertunjukan sore, nasih lagi dalam suatu peranan lain dalam televisi pagi. Perbedaan yang besar dari peranan seseorang aktor profesional adalah bahwa peranan sosial seseorang tidaklah didefinisikan setajam itu. Bilamana seorang individu menerima dari satu peranan sosialnya, dia tidaklah dipimpin, sebagai seorang aktor, oleh naskah

<sup>31</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pres, 2002), h.1132.

<sup>32</sup> David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: CV. Raja Wali, 2009), h.105

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diikutinya. Sebagai gantinya, dia sebagian besar harus membuat improvisasi sebagaimana aktor didalam komedi italia yang tradisional.<sup>33</sup>

Maksud konsep peranan adalah untuk membuat garis batas antara masyarakat dan inividu. Dalam batas peranan sosialnya, seseorang mempunyai batas peranan sosialnya, seseorang mempunyai batas tertentu. Sebagaimana kita telah tunjukan, dia tidak mengikuti naskah tertulis, akan tetapi hanya garis petunjuk umum.

Pentingnya peranan, karena ia mengatur perilaku seseorang meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan prilaku sendiri dengan prilaku orang-orang sekelompoknya.

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:<sup>34</sup>

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyrakat atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai individu yang penting dalam struktur social masyarakat.

### B. Tinjauan Umum Lembaga

Lembaga negara atau disebut juga dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen, atau lembaga negara

<sup>33</sup> Maurice Duverger penerjemah, Daniel Dhakidae, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), Cet ke-10, h.105

<sup>34</sup> Soerjono Soekarto, *Tuntutan Dakwah ddan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta, Pustaka Anani, 1983), h.15.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja. Ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaan dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hierarki kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>35</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan, lembaga negara merupakan konsekuensi logis dari pemisahan kekuasaan. Cabang kekuasaan yang terpisah tersebut membutuhkan lembaga negara sebagai pelaksana dari cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Artinya lembaga-lembaga ini yang menjadi organ pelaksana dari organisasi kekuasaan negara, yang dalam bahasa George Jelineck, merupakan “*contradiction in objecto*”. Jika negara tidak memiliki organ-organ atau perlengkapan negara, maka ia menjadi tidak sesuai dengan sifatnya. Singkatnya, keberadaan lembaga-lembaga negara menjadi niscaya untuk mengisi dan menjalankan negara.<sup>36</sup>

Ketentuan mengenai kedudukan suatu lembaga negara itu berdasarkan tingkatan hirarki aturan yang menjadi dasar pembentukannya. Menurut Jimly Asshiddiqie ada empat tingkatan lembaga negara berdasarkan Teori Norma Sumber Legitimasi yaitu:<sup>37</sup>

1. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan undang-undang, peraturan

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perekembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 37.

<sup>36</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h.

<sup>37</sup> Aulia Rahman, *Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga peradilan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), h.19-20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Lembaga negara pada tingkatan ini misalnya adalah DPR, Presiden, dan MK. Kewenangan lembaga-lembaga ini, diatur dalam konstitusi, serta dirinci dalam undang-undang, meskipun pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan keputusan presiden sebagai pejabat administrasi negara tertinggi.

2. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden. Lembaga tingkat kedua ini adalah yang sumber kewenangannya berdasarkan undang-undang. Proses pemberian kewenangan pada lembaga-lembaga ini melibatkan peran DPR dan Presiden, atau untuk hal-hal tertentu melibatkan pula peran DPD. Oleh karena itu, pembubaran atau perubahan bentuk dan kewenangan lembaga semacam ini juga melibatkan DPR dan Presiden. Sebagai missal, Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPK, KPI, PPATK, dan sebagainya, dibentuk berdasarkan undang-undang, karena itu tidak dapat diubah atau dibubarkan kecuali mengubah atau mencabut undang-undang.
3. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden, yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan presiden. Lembaga-lembaga ini memiliki sumber kewenangan murni dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sehingga pembentukannya sepenuhnya bersumber dari *Beleid* Presiden (*Presidential Policy*). Artinya, pembentukan, perubahan, ataupun pembubaranya tergantung kepada kebijakan presiden semata. Pengaturan mengenai organisasi lembaga

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara yang bersangkutan juga cukup dituangkan dalam peraturan presiden bersifat *regeling*, dan pengangkatanya dilakukan dengan keputusan presiden yang bersifat *beschiking*.

4. Lembaga yang dibentuk berdasarkan perauran menteri, yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan menteri atau keputusan pejabat dibawah menteri. Pada tingkatan rendah ini. Lembaga terkait dibentuk atas inisiatif menteri sebagai pejabat publik, berdasarkan kebutuhan, berkenan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Menteri dapat saja membentuk badan, dewan, lembaga, ataupun panitia-panitia yang bersifat permanen dan spesifik.

Secara konseptual, tujuan dibentuknya lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara, selain untuk menjalankan fungsi negara, juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara actual. Secara praktis, fungsi lembaga negara dimaksud untuk melaksanakan dasar atau ideologi negara dalam mebcapai tujuan negara. Dalam negara hukum yang demokratik, hubungan anantara infrastruktur politik (*socio political sphere*) di mana rakyat selaku (*governmental political sphere*) sebagai pemegang atau pelaksana kedaulatan rakyat menurut hukum (*legal sovereignty*), terdapat hubungan yang saling menentukan dan saling memengaruhi.<sup>38</sup>

Pada hakikatnya, lembaga negara dalam suatu negara bersifat independen dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Lembaga negara

<sup>38</sup> Marwan Mas, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, ( Jakarta: Rajawali Pres, 1981), h.196

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.<sup>39</sup>

Lembaga negara berdasarkan sifatnya tergolong atas dua jenis yaitu lembaga negara Dependensi, dan lembaga negara Independen (mandiri). Lembaga independen disebut juga sebagai lembaga pembantu (*state auxiliary organs* atau *auxiliary institution*), dimana lembaga ini memberikan bantuan terhadap kerja dan wewenang lembaga negara utama.<sup>40</sup>

Lembaga negara atau organ negara diseluruh negara memiliki bentuknya masing-masing, baik itu negara berkembang maupun negara maju, menurut Gerry Stoket yang dikutip Jimly Asshidiqqie, membagi tipe lembaga atau organ negara kedalam enam tipe, yaitu:

1. Organ yang bersifat *Central Government's arms's length agency*;
2. Organ yang merupakan *local authority implementation agency*;
3. Organ atau institusi sebagai *public/ private partnership organization*;
4. Organ sebagai *user-organisation*;
5. Organ yang merupakan *inter-governmental forum*;
6. Organ yang merupakan *joint boards*;

<sup>39</sup> *Op.cit*, h. 197

<sup>40</sup> Jimly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 339



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, berbicara mengenai lembaga negara independen juga memiliki konsep secara teoritik, Menurut Zainal Arifin menyatakan keseluruhan ciri teoritik yang menjadi dasar perihal lembaga negara independen, setidaknya bisa dicirikan menjadi beberapa ciri berikut ini.<sup>41</sup>

*Pertama*, lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas yang dulunya dipegang oleh pemerintah. Kedua, proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh *political appointee*, atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu, akan tetapi melibatkan lembaga negara lain dalam kerangka fungsi *check and balances*. Bisa juga diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, intinya tidak melibatkan kekuasaan politik.

*Ketiga*, proses pemilihan dan pemberhentiannya hanya bisa dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh aturan yang mendasarinya. *Keempat*, meski memegang kuasa sebagai alat negara, tetapi proses deliberasinya sangat kuat, sehingga baik keanggotaan, proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan rakyat selaku pemegang kedaulatan negara, baik secara langsung kepada masyarakat maupun secara tidak langsung melalui parlemen. *Kelima*, kepemimpinan yang bersifat kolegiat dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

---

<sup>41</sup> *Op.cit*, h. 64.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Keenam*, bukan merupakan lembaga negara utama yang dalam kaidah tanpa keberadaanya negara mustahil berjalan. Tetapi bukan berarti tidak penting untuk ada. Keberadaanya tetap penting karena tuntutan masa transisi maupun kebutuhan ketatanegaraan yang semakin kompleks. *Ketujuh*, memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat *self regulated* dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku secara umum. *Kedelapan*, memiliki basis legitimasi di aturan baik konstitusi dan/ atau undang-undang. Dalam artian ada basis legitimasi di situ, meskipun kemudian dibentuk dengan undang-undang saja untuk lembaga yang ada di konstitusi dan di peraturan pemerintah saja untuk lembaga yang ada di undang-undang.

Selain lembaga negara disuatu negara juga mengakui adanya lembaga yang bersumber dari masyarakat yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan. Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, lembaga-lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. karena setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan, terhipun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Suatu lembaga kemasyarakatan menurut Soerjono merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian lembaga-lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 77-78

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok
2. Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control)

Pendapat di atas menerangkan bahwa, tidak semua kaidah-kaidah merupakan lembaga kemasyarakatan, akan tetapi hanya yang mengatur kebutuhan pokok saja yang merupakan lembaga kemasyarakatan. Artinya kaidah-kaidah tersebut harus mengalami proses pelembagaan terlebih dahulu. Untuk menjadi salah satu bagian dari lembaga kemasyarakatan, yang dimaksudkan di sini adalah agar kaidah-kaidah tadi diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai dalam kehidupan sehari-hari. Proses pelembagaan tidak berhenti demikian saja, akan tetapi dapat berlangsung lebih jauh lagi sehingga suatu kaidah tidak saja melembaga, akan tetapi menjiwai dan mendarah daging (internalized) pada warga masyarakat.

Adapun menurut Soerjono Soekanto mengutip pendapat beberapa klasifikasi lembaga kemasyarakatan dari Gillin dan Gillin sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Lembaga masyarakat, dari sudut perkembangannya dikenal adanya *creative institution* dan *enacted institution*. *Creative institution* atau lembaga-lembaga utama, merupakan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dengan sendirinya tumbuh dari adat-istiadat masyarakat. Sebaliknya

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.211

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

enacted institution dengan sengaja untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu, tetapi yang masih tetap didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat. Pengalaman-pengalaman di dalam melaksanakan kebiasaan tersebut kemudian disistematisir dan diatur untuk kemudian dituangkan kedalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh penguasa (masyarakat yang bersangkutan)

2. Lembaga masyarakat, dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atas basic institution dan subsidiary institution. Basic institution dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Sebaliknya subsidiary institution yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi.
3. Lembaga masyarakat, dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan antara approved atau socially sanctioned institution dengan unsanctioned institution. Yang pertama merupakan lembaga-lembaga yang diterima oleh masyarakat, sedangkan yang kedua ditolak, walaupun kadang-kadang masyarakat tidak berhasil untuk memberantasnya.
4. Lembaga masyarakat, dari sudut fungsinya, terdapat perbedaan antara operative institution dengan regulative institution. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, sedangkan yang kedua bertujuan untuk mengawasi tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga itu sendiri.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Antara lembaga negara dengan lembaga kemasyarakatan memiliki kaitan satu sama lain, dimana pada dasarnya pembentukan lembaga-lembaga mandiri didorong oleh keinginan mencari solusi untuk menyelesaikan persoalan dan mencari jalan keluar, dimana pada awalnya lembaga-lembaga tinggi negara belum dapat menyelesaikan maka lembaga kemasyarakatan yang dekat berada dilingkungan masyarakat juga lebih memiliki peluang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang berada dilingkungan masyarakat.

#### C. Tinjauan Umum Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). Peraturan daerah merupakan salah satu instrument bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberi wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangga sendiri termasuk membentuk peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.146.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan Peraturan Daerah, Pasal 7 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004 menegaskan sebagai berikut:

- a. Perda provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi bersama dengan gubernur.
- b. Perda kabupaten/kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 12 ditegaskan, bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan memiliki 3 (tiga) unsur penting, yaitu:

- a). peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis, sehingga dapat juga disebut hukum tertulis, b) peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ), yang memiliki wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum, dan c) peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum. Sedangkan suatu keputusan itu dapat dikategorikan sebagai 'ketetapan' atau *beschikking*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu: a) keputusan sepihak, b) keputusan tersebut adalah badan atau pejabat tata usaha negara, d) keputusan mengenai masalah atau keadaan kongkrit dan individual dan e) keputusan dimaksudkan untuk mempunyai akibat hukum tertentu yaitu menciptakan, mengubah, menghentikan, atau membatalkan suatu hubungan hukum.<sup>45</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pasal 1 angka 25 yang menegaskan bahwa peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Selanjutnya, dalam pasal 236 ayat (1) Undang-Undang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa peraturan daerah dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah pembentukan perda. Dalam ayat (2) Perda yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Ayat (3) menyatakan bahwa perda memuat materi muatan yaitu:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Oleh karena Perda merupakan hasil kerja bersama antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, maka tata cara membentuk Perda harus ditinjau dari beberapa unsur pemerintahan daerah tersebut.<sup>46</sup>

#### 1. Unsur DPRD

Perda adalah suatu bentuk produk legislatif tingkat daerah, karena itu tidak dapat terlepas dari DPRD. Keikutsertaan DPRD membentuk

<sup>45</sup> Zainal Arifin Housen, *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum*, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012 :313

<sup>46</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h.216.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perda bertalian dengan wewenang DPRD dibidang legislative atau yang secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai penunjang fungsi legislative.

#### 2. Unsur Kepala Daerah

Keikutsertaan kepala daerah dalam pembentukan perda, mencakup kegiatan-kegiatan: 1) berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, kepala daerah menegaskan kekuasaan membentuk perda; 2) Bersama- sama DPRD membahas Raperda; 3) Menetapkan Raperda yang telah disetujui DPRD menjadi Perda; 4) Pengundangan .

#### 3. Unsur Partisipasi

Partisipasi dimaksud sebagai keikutsertaan pihak-pihak di luar DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun dan membentuk Raperda atau Perda.

Menurut Bagir Manan, mengingat bahwa Perda (termasuk Peraturan Desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "pertingkatan", melainkan juga pada lingkungan wewenangnya". Suatu Perda yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan tingkat tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan Daerah.<sup>47</sup>

Ketentuan mengenai kedudukan perda dalam hierarki perundang-undangan menurut Abu Sama yaitu: dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan perda ini, baik perda tingkat provinsi maupun perda tingkat kabupaten atau kota, dapat dilihat setara dengan Undang-Undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislative. Namun, dari segi isinya, sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, Undang-Undang lebih tinggi kedudukannya dari pada Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten atau Perda Kota. Karena itu, semua prinsip hirerarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang draajatnya lebih tinggi.<sup>48</sup>

## Tinjauan Umum Hukum Adat

### 1. Pengertian Hukum Adat

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama bahkan berabad-abad. Dalam hidup yang berpegangan terhadap adat maka perlu yang namanya suatu aturan atau hukum. Menurut Ter Haar , yang memberikan

<sup>47</sup> Ni'matuI Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan* Jurnal Hukum No, 1 Vol 13 Januari 2006 ;36

<sup>48</sup> Abu Samah, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia*, (Riau, Suska Pres, 2016), h. 144.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

defenisi dari hukum adat ialah, hukum yang lahir dari dan dipelihara oleh keputusan- keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan-kepentingan para hakim yang bertugas mengadidli sengketa, sepanjang keputusan-keputusan itu tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas seirama dengan kesadaran tersebut, diterima/ diakui atau tidak ditoleransikan olehnya.<sup>49</sup>

Didalam tradisi Melayu di Riau paling kurang ada 4 macam konsep pengertian adat. Pertama ialah adat yang sebenarnya adat, adat yang asli. Yakni adat, norma atau hukum yang datang dari Allah yang berlaku terhadap segenap jagat raya ini. Sebagian dari hukum Allah itu telah wujud sebagai syarak (ajaran Islam). Sebagian lagi menjadi hukum alam itu sendiri. Yang kedua ialah adat yang diistiadatkan. Inilah hukum, norma atau adat buah pikiran leluhur manusia yang oiawai yang kemudian berperanan untuk mengatur lalu lintas pergaulan kehidupan manusia. Meskipun adat yang diadatkan ini merupakan seperangkat norma dan saksi hasil gagasan leluhur yang bijaksana, tetapi karya manusia tetap rusak (berubah) oleh ruang dan waktu serta oleh selera manusia pada zamannya. Itulah sebabnya meskipun adat rancangan leluhur ini dipelihara dan dilestarikan, tetapi terbuka peluang untuk disisipi dan dikurangi, agar tetap dapat menjawab tantangan kehidupan masyarakat. Yang ketiga disebut

<sup>49</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet 2 h. 115

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adat yang teradat yakni konvensi masyarakat atau keputusan hasil musyawarah yang kemudian dikokohkan menjadi adat atau aturan. Adat yang teradat lebih banyak menggunakan aturan budi pekerti sehingga membuat penampilan manusia yang berbudi bahasa. Yang keempat ialah adat istiadat, yaitu berbagai ketentuan atau perilaku yang sebaliknya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat. Karena. Ketentuan atau adab ini dipandang baik, maka dilestarikan pula sehingga menjadi tradisi atau resam Melayu. Adat istiadat atau tradisi telah mengatur hubungan manusia dengan alam.<sup>50</sup>

Adat yang teradat (dasar-dasar hukum rancangan leluhur) adat yang teradat (adab budi pekerti) dan adat istiadat (tradisi memelihara alam) harus ditapis oleh adat yang sebenarnya adat, yakni oleh hukum yang sejati dari Allah dan Rasulnya. Karena itulah adat harus bersendi kitabullah, maksudnya tanpa mengindahkan hukum Allah, semua hukum buatan manusia hanya akan menjadi alat kekuasaan dan pemuas hawa nafsu belaka, sehingga akhirnya akan mendatangkan kehancuran dan malapetakan kepada umat.

## 2. Sistem Hukum Adat

Suatu sistem hukum merupakan susunan yang teratur dari berbagai unsur, di mana unsur yang satu dengan unsur yang lain secara fungsional saling bertautan sehingga memberikan suatu kesatuan pengertian. Dalam hukum adat mengenal sistem hukum sebagai berikut:

<sup>50</sup> UU Hamidy, *Jagad Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau*, (Pekanbaru: Bilim Kreatif Press, 2014) h. 71-74.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mendekati sistem hukum Inggris.

Menurut Prof Mr. MM. Djojodigono, dalam negara *Anglo Saxon* dimana sistem *Common Law* tidak lain dari pada sistem hukum adat hanya bahannya yang berlainan. Didalam hukum adat bahannya ialah Hukum Indonesia asli, sedangkan didalam hukum *Common Law* bahannya memuat banyak unsur-unsur hukum romawi kuno, yang konon katanya telah mengalami *Receptio In Complexu*.

- b. Tidak membedakan hukum Publik dan Privat

Hukum adat kita tidak seperti halnya hukum eropa, dimana membedakan antara hukum yang bersifat public dan yang bersifat perdata. Hukum Publik yang menyangkut kepentingan umum seperti hukum ketatanegaraan yang mengatur tugas-tugas kenegaraan dalam hubungan antara badan-badan negara dan tugas-tugas pemerintahan dan anggota-anggota masyarakat. Hukum perdata yang mengatur hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dan anggota masyarakat terhadap badan negara sebagai badan hukum.

- c. Tidak membedakan hak kebendaan dan hak perorang.

Menurut hukum adat hak-hak kebendaan dan hak-hak perorangan itu baik berujud benda ataupun tidak seperti hak atas nyawa, kehormatan, hak cipta dan lain-lainnya tidak bersifat mutlak sebagai hak pribadinya sendiri oleh Karena pribadinya tidak lepas hubungannya dengan kekeluargaan dan kekerabatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak membedakan pelanggaran perdata dan pidana

Hukum adat juga tidak membedakan antara perbuatan yang sifatnya pelanggaran hukum perdata dan pidana sehingga hakim yang memeriksanya sama. Menurut peradilan adat kedua pelanggaran dimaksud yang dilakukan oleh seseorang diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan sekaligus dalam suatu persidangan yang tidak terpisah.<sup>51</sup>

### 3. Bentuk Hukum Adat

Bentuk hukum adat ada 2 yaitu yang tertulis dan yang tercatat. Hukum adat memiliki bentuk yang berbeda dengan bentuk hukum negara-negara modern, oleh karena itu kata tertulis diganti dengan kata tercatat karena memang ada beberapa bagian dari hukum adat di Indonesia ini dicatat dalam daun lontar atau kitab raja-raja, dan sebagainya. Seperti awig-awig di Bali ditulis dalam daun lontar atau dalam laporan-laporan oleh para pengkaji hukum, jadi tidak semua hukum adat itu tidak tertulis dalam arti ditulis atau dicatat dalam buku hukum. Menurut Surojo Wignjodipuro menyatakan ada tiga bentuk dari hukum adat:<sup>52</sup>

- a. Tidak tertulis atau *Ius Non scriptum*, bentuk ini merupakan bentuk yang terbesar.
- b. Tertulis atau *Ius scriptum*, hanya sebagian kecil saja misalnya *titiswara* atau *Peswara-peswara* yang dimuat dalam *awig-awig* di Bali.

<sup>51</sup> Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2013), Cet ke-3, h. 41-44

<sup>52</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), Cet ke-13, h. 33-36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Uraian-uraian hukum secara tertulis, lazimnya adalah merupakan hasil kajian para peneliti para sarjana hukum.

**4. Dasar Perundang-Undangan Berlakunya Hukum Adat**

Dasar hukum adat yang terkait langsung dengan adat yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 18 B ayat (2), yang berbunyi “ Negara dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republic Indonesiayang diatur dalam undang-undang”.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria, pasal 3 yang berbunyi “ dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, hasrus sedemikianrupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.
- c. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 1 ayat (12) yang berbunyi “ desa atau yang disebut lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia”.

- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pasal 67 ayat (1) yang menyatakan keberadaan masyarakat adat menurut kenyataannya memenuhi unsur- unsur sebagai berikut :<sup>53</sup>
  - 1) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*).
  - 2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
  - 3) Ada wilayah hukum adat yang jelas.
  - 4) Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan adat yang masih ditaati
  - 5) Mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

<sup>53</sup> Hendra Nurtjahjo, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perkara di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 33-34

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai Peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau adalah memberikan masukan berupa saran maupun pendapat baik diminta maupun tidak serta menjadi wadah tempat menampung aspirasi masyarakat adat dalam menyuarakan pendapat dan untuk kepentingan masyarakat adat khususnya masyarakat adat Pelalawan. Belum adanya Perda yang mengatur tentang LAM Riau Pelalawan menyebabkan LAM Riau Pelalawan masih menggunakan Perda LAM Riau hingga sekarang dan hal ini menyebabkan eksistensi dari LAM Riau Pelalawan menjadi tidak optimal dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat maupun hak-hak konstitusional.
2. Faktor yang menghambat peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau adalah sumber finansial, sumber daya manusia, sumber daya fisik,

dan kerja sama. Sedangkan faktor pendukung ialah adanya peraturan yang lebih tinggi yang menamanahakn supaya lahirnya peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan tentang LAM di Pelalawan sehingga mereka dapat menjalankan perannya, serta faktor pendukungnya ialah dorongan dari masyarakat adat pelalawaan itu sendiri.

## **B. Saran**

1. Pemerintah daerah seharusnya melakukan mediasi atau mendorong kepada DPRD dan LAM Riau Pelalawan sehingga dapat di sahkannya Perda LAM Riau Pelalawan sehingga eksistensi dari LAM Riau Pelalawan dapat terjamin atau dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi masyarakat adat Kabupaten Pelalawan.
2. Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan sebaiknya tetap berusaha untuk melakukan peran sebagai wadah masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, meskipun belum adanya peraturan Peraturan Lembaga Adat Riau Pelalawan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2004)
- Asshiddiqie, Jimly, *Perekembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)
- Ali,, Zainudin *Metodel Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Berry, David, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: CV. Raja Wali, 2009)
- Duverger, Maurice penerjemah, Daniel Dhakidae, *Sosiologi Politik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003)
- Effendy, Tenas dkk, *Hutan Tanah Wilayah dan Permasalahan di Kabupaten Pelalawan*, (Pelalawan: PT Subenta Perkasa, 2005)
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*,(Bandung: Nusa Media, 2009)
- Hasyimzoem, Yusnani dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017)
- Hamidy, UU, *Jagad Melayu Dalam Lintas Budaya Di Riau*, (Pekanbaru: Bilim Kreatif Pres, 2014)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, , 1986)
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*,(Jakarta: Aksara Baru, 1979)
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016)
- Mas, Marwan, *Hukum Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*, ( Jakarta: Rajawali Pres, 2018)
- Nurtjahjo, Hendra, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Perkara Di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010)
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pres, 2002)

- Pide, Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014)
- Rahman, Aulia, *Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Judicial Corruption Lembaga peradilan*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017)
- Rato, Dominikus, *Hukum Adat suatu pengantar*, (Yogyakarta: LaksbangPressindo, 2011)
- Soekarto, Soerjono, *Tuntutan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta, Pustaka Amani, 1983)
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- \_\_\_\_\_, Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Setiadi, Tolib, *Intisari Hukum Indonesia*, ( Bandung; Alfabeta, 2013)
- Samah, Abu, *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desa Di Indonesia*, (Riau, Suska Pres, 2016)
- Salman, H.R. Otje Soemadinigrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, (Bandung : PT Alumni, 2002)
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003)
- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Thamrin, Husni, *Fenomena Budaya, Sosial-Agama Dan Pendidikan*, (Pekanbaru: Pusaka Riau, 2007)
- Utomo, Laksanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Ayu Mukhtaoumi dkk. *Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan*, Jurnal Administrasi Publik, Vol 1, No. 2, h.33
- Inesentius Samsul, *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Negara Hukum: Vol, No, 2 November 2014, h. 128

Maryati Bachtiar dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat Di Kabupaten Pelalawan Terkait Dengan Penerbitan Ijin Lahan*, Jurnal Media Hukum, Vol.24 No. 1, Juni 2017:76

Ni'matuI Huda, *Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan* Jurnal Hukum No, 1 Vol 13 Januari2006 ;36

Sepian dkk, *Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi*, Jurnal Titian: Vol . 1, No. 2, Desember 2017, 192-193

Zainal Arifin Housen, *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum*, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012 :313

[http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic\\_content.main&id\\_gc=63](http://www.pelalawankab.go.id/index.php?action=generic_content.main&id_gc=63)

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/sejarah-pebatinan-petalangan-di-langgam/>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau

Peraturan Gubernur Riau Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6023/2019  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 26 Juli 2019

Kepada  
Yth. Hj. Nur'aini Sahu, SH, MH  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : AKHMAD MUSENO  
NIM : 11527104016  
Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Peran lembaga adat melayu riau pelalawan dalam pembentukan peraturan daerah di kabupaten pelalawan berdasarkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang lembaga adat melayu riau"  
Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

*[Signature]*  
Dr. Drs. Heri Sunandar, MEd  
NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/18549  
TENTANG



182010

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/1142/2019 Tanggal 12 Februari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

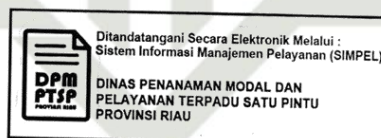
- Nama : **AKHMAD MUSENO**
- NIM / KTP : **11527104016**
- Program Studi : **ILMU HUKUM**
- Jenjang : **S1**
- Alamat : **PEKANBARU**
- Judul Penelitian : **PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU**
- Lokasi Penelitian : **LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN PELALAWAN**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 12 Februari 2019



### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan di Pelalawan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Sultan Syarif Hasyim II No. 01 Telp. / Fax. (0761) 95922  
 PANGKALAN KERINCI

SURAT KETERANGAN  
 NOMOR : 800/SET-DPRD/UM/2019/SK

Yang bertanda tangan di bawah :

- |            |  |
|------------|--|
| a. Nama    | : Drs.T.RIDWAN MUSTAFA,MH              |
| b. Nip     | : 19600508 198303 1 008                |
| c. Jabatan | : Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan |

Dengan ini menerangkan bahwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| a. Nama               | : AKHMAD MUSENO   |
| b. Nomor Mahasiswa    | : 11527104016   |
| c. Fakultas / Jurusan | : Ilmu Hukum/Hukum  |
| d. Perguruan Tinggi   | : Universitas Sultan Syarif Kasim Riau  |
| e. Maksud             | : Bahwa nama di atas benar melaksanakan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi,berdasarkan surat, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/2357/2019 tanggal 18 Maret 2019 dengan judul : (Peran Lembaga Adat dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Pelalawan) di Sekretariat DPRD Kabupaten Pelalawan. |

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Pangkalan Kerinci, 02 Juli 2019  
 Sekretaris DPRD  
 Kabupaten Pelalawan



**Drs.T.RIDWAN MUSTAFA,MH**  
 Pembina Utama Muda IV.c  
 NIP. 19600508 198303 1 008

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN PELALAWAN

Balai Adat "Datuk Bandar Setia Diraja" Jl. H. Abdul Jalil No. 1 Pkl. Kerinci Pelalawan E-mail : [lampelalawan@gmail.com](mailto:lampelalawan@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : B-13/DPH/LAM-PLW/2019

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dengan hormat dan salam ta'zim, semoga Tuan sehat walafiat dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, aamiin.

Kami dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan (LAMR-KP) Menerangkan bahwa:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : AKHMAD MUSENO   |
| 2. NIM/KTP           | : 11527104016   |
| 3. Prodrum Study     | : ILMU HUKUM  |
| 4. Jenjang           | : S1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau  |
| 5. Alamat            | : Pekanbaru   |
| 6. Judul Penelitian  | : PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN PELALAWAN  |

Benar sudah melakukan penelitian dan pengumpulan data terkait penelitiannya diatas.

Demikian surat ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pangkalan Kerinci, 27 Dzulqaidah 1440 H  
30 Juli 2019 M

LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU  
KABUPATEN PELALAWAN  
Ketua,



SAMSUARDI, S.Pi

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

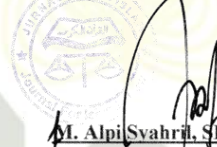
### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **AKHMAD MUSENO**  
 NIM : **11527104016**  
 Jurusan : **ILMU HUKUM**  
 Judul : **PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU PELALAWAN DALAM PEBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTNAG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU**  
 Pembimbing : **Hj. Nuraini Sahu, SH. MH**  
 Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 09 Oktober 2019

An. Pimpinan Redaksi

  
**M. Alpi Svahri, SH., MH., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



## BIOGRAFI PENULIS

Akhmad Museno, lahir di Desa Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, pada tanggal 18 Mei 1997 merupakan anak ke tiga dari tiga (3) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Karsono dan Ibunda Busriyah. Pada Tahun 2003 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 010 Banjar Panjang, Kecamatan Kerumutan.

Lulus pada Tahun 2009. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Pelalawan selama 3 (tiga) Tahun yaitu pada Tahun 2009 sampai 2012. Tamat dari sekolah menengah atau sederajat tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah di atas ke Madrasah Aliyah (MA) Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Klambu Purwodadi selama 3 (tiga) tahun yaitu dari Tahun 2012 sampai 2015. Kemudian pada tahun 2015 berkat restu orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan Jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 bulan (dua bulan) di Agraria dan Tata Ruang Dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pekanbaru. Selain itu penulis juga aktif dalam organisasi baik internal maupun eksternal kampus sebagai pengasah dan pengelolabakat serta kepemimpinan yang baik. Atas berkat rahmat Allah swt, serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul *“Peran Lembaga Adat Melayu Riau Pelalawan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau”* di bawah bimbingan langsung Ibuk Hj.Nuraini sahu, SH.,MH. berdasarkan hasil ujian Srjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada tanggal 27 Agustus 2019, penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak mendapat gelar Sarjana Hukum.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.